PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

**Ani Nurul Imtihanah
(IAIN Metro)**

ABSTRAK

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Setelah terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu bagi perempuan yang disebut masa iddah di mana dalam masa iddah ini, istri wajib mendapatkan haknya seperti hak nafkah. Imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad) sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dalam bentuk talak raj'i, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sedangkan untuk talak ba'in keempat Imam mazhab berbeda pendapat mengenai hak nafkah dan tempat tinggal, Imam Abu Hanifah berpendapat ketika istri ditalak ba'in dia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa mantan istri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal saja, sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa mantan istri tersebut tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. Pendapat Imam Ahmad ini memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 b, yang menyatakan bahwa, suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri yang ditalak raj'i dan tidak untuk istri yang ditalak ba'in.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan objek penelitiannya adalah pendapat Imam mazhab dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi, yang digunakan untuk mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis serta membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat Imam mazhab dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan studi perbandingan hukum Islam (pendapat empat Imam mazhab) dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, kedepannya untuk lebih mempertimbangkan hak istri, dengan dua jenis talak tersebut, dalam hal nafkah khususnya setelah ketika masa iddah sedang berlangsung. Sehingga istri tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ketika dia sedang menjalani masa iddah, tidak perduli dari jenis talak yang dijatuhkan oleh suaminya.

A. Pengantar

Setiap manusia yang lahir di dunia ini, pasti menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa adanya usaha serta mematuhi semua peraturan yang ada. Salah satu proses untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan perkawinan yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga.¹ Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, di karenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam sebuah rumah tangga yang telah dibina. Penyatuan dua manusia yang berbeda sifat dan karakter pasti akan menimbulkan masalah. Apabila masalah tersebut tidak dapat teratasi maka dapat berujung kepada perceraian.³

Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

رَوَّعَ لِسَ مَ لَاقَ : بَأْغُ مَضَ لَ مَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ L
 عَمَرَمَرَنَّا رَرُمُسُ كُولَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ L
 زَعَزَعَوَ لَ لَ لَ لَ لَ L عَنَّا بِن

Artinya: Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.⁴

Melihat hadits di atas perceraian merupakan perbuatan yang halal, tetapi di benci oleh Allah SWT.⁵ Walaupun di benci Allah, tingkat perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, bahkan dari Badan Peradilan Agama (BPA) Mahkamah Agung (MA) mencatat dari tahun 2005 sampai tahun 2011 tingkat perceraian naik hingga 70%⁶ dan dalam setiap pernikahan 10% di antaranya berakhir dengan perceraian.⁶ Data yang terbaru tahun 2012 orang yang menikah 2.291.265 kejadian, dari jumlah tersebut mereka yang bercerai 372.577 Tahun 2013 menikah 2.218.130 kejadian, perceraian 324.572 kejadian.

Sebagai contoh di dua tahun terakhir di 2012 dan 2013 jika diambil tengahnya, angka perceraian di dua tahun itu sekitar 350.000 kasus, berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam, apalagi sebanyak 70 % perceraian terjadi karena cerai gugat dari pihak istri artinya 28 dari 40 berupa cerai gugat.⁷ Yang berdampak pada talak ba'in (istri

¹M.Anshari, *Hukum Perkawinan Di indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h 65.

²*Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). h 2.

³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). h 191

⁴Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* alih bahasa Machfuddin Aladip, Semarang, Toha Putra, 1985. hal 544.

⁵Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeb Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta, Amzah, 2009. hal 257

⁶Musdalifah, “Tingkat Perceraian”, dalam <http://www.republika.co.id>. 24 januari 2012

⁷[http:// www.kompasiana .com/pak cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam](http://www.kompasiana.com/pak-cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam). 8 februari 2015

tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal) dimana para ulama Mazhab berbeda pendapat mengani hal ini.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in

Abu Hanifah adalah ulama ahli ra'yu merupakan kelompok yang banyak memakai ra'yu dan jarang memakai hadis.⁸ Namun jika kemudian mendapatkan hadis maka mereka langsung menggunakan hadis.⁹ Dizaman itu ahli ra'yu meyakini keharusan memutuskan hukum berdasarkan ijtihad. Sebab kedustaan atas nama Rasulullah makin menjadi-jadi dan permasalahan juga datang silih berganti. Sehingga mazhab ini sangat mengutamakan al-Qur'an dalam mengambil hukum.

Sehingga dalam masalah fiqh mazhab hanafi juga menggunakan ra'yu dalam mengambil dalil hukum, tidak terkecuali dalam masalah perkawinan. Hal ini terlihat ketika imam Abu Hanifah mengungkapkan tentang masalah hak istri pada masa iddah talak ba'in, terutama dalam hal nafkah, yang pertama imam Abu Hanifah gunakan yaitu al-Qur'an, yaitu surat at-Thalak ayat 6 :

Artinya:

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak ba'in dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi

⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, alih bahasa Abdul Majid (Solo: Aqwam, 2012), h 74

⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h 72

- ¹⁰ Syams ad-Din As-Sarakhsi, *al-Mabsut* jilid V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), h 102
- ¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Madinah: Dar Fikr Ma'asir, 2004) H 7203
- ¹² Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h 468
- ¹³ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, h 469

halal (telah selesai masa iddah), beritahulah Aku. (HR. Malik No. 1209).¹⁴

Hadis di atas sebenarnya, menjelaskan tentang Fatimah yang menjalani masa iddahnya di rumah Ibn Umi Maktum, dan bukan di rumah mantan suaminya yaitu, Abu Amr bin Hafsh, hal ini tentunya menunjukkan bahwa Fatimah tidak mempunyai hak tempat tinggal, hal yang perlu diketahui adalah bahwa Fatimah bin Qais termasuk seorang wanita yang panjang lidahnya terhadap keluarga suaminya.¹⁵ Sehingga dalam hal ini, sahabat-sahabat lain seperti Aisyah, Marwan, Yazid ibn al-Musayyab mengingkari hadis ini, karena bisa jadi dia menyembunyikan sebab mengapa Rasulullah memerintahkannya untuk menjalani masa iddah bukan di rumah suaminya.¹⁶

Imam Malik menyatakan bahwa hak tempat tinggal diberikan kepada mantan istri, untuk semua bentuk perceraian dalam bentuk talak, raj'i ataupun ba'in baik mantan istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak.¹⁷

Artinya:

“Dari Malik bahwa ia mendengar Ibn Syihab berkata : wanita yang ditalak tiga tidak boleh keluar dari rumahnya hingga halal (selesai masa iddahnya), namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali bila hamil ia mendapatkan nafkah hingga melahirkan”

Malik mengatakan, “demikian pula pendapat kami.”¹⁸, dengan demikian menurut imam Malik bahwa wanita yang dicerai dengan tala *al-battah*, hanya berhak menempati rumah mantan suaminya, hal ini juga didasarkan pada firman Allah, “*tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertampat tinggal.*” (ath-Talaq: 6) diwajibkan untuk istri tempat tinggal saja apakah dia dalam keadaan hamil ataupun tidak.¹⁹

D. Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in

Imam Syafi'i menetapkan hak istri, ketika tertalak ba'in imam Syafi'i tidak lupa untuk menggunakan ayat al-Qur'an sebagai sumber hujah pertama, yaitu surat at-Talak ayat 6, Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini bahwa wanita, yang ditalak oleh suaminya dengan talak ba'in, bahwa dia (mantan suami)

¹⁴ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)., h 818

¹⁵ Wahyu Setiawan, *Perempuan menggugat*, h 47

¹⁶ Wahyu Setiawan, *Perempuan menggugat*, h 47

¹⁷ Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr), h 108

¹⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, h 820

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Madinah: Dar Fikr Ma'asir, 2004) H 7203

memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan istrinya. Dalam hal ini hanya perempuan yang hamil saja, yang berhak mendapatkan nafkah.²⁰

Imam Syafi’I mengatakan dalil dari al-Qur’an, adalah mengenai tidak ada hak nafkah atas wanita yang suaminya tidak memiliki ruju’ (ba’in). Demikian juga menurut sunnah Rasulullah SAW, imam Syafi’I juga berkata “bahwasanya Abu Amr bin Hafsh menalaknnya dengan talak ba’in dimana Abu Amr berpergian ke Syam, lalu ia mengutus wakilnya kepada Fathimah dengan gandum, maka Fathimah memarahinya lalu wakilnya berkata tidak ada nafkahmu atas kami. Lalu Fathimah datang kepada Nabi SAW, lalu ia menyebutkan kepada Nabi tentang demikian maka Nabi SAW bersabda : “tidak ada nafkah bagimu atas mereka”

Lebih lanjut Abdul Majid memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata “ wanita yang dithalak ba’in sedang ia dalam keadaan hamil dari padanya tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali laki-laki wajib memberi nafkah kepadanya karena hamil. Bila wanita itu tidak hamil maka tidak ada nafkah baginya”.

Selanjutnya Imam Syafi’I mengatakan bahwa setiap wanita yang tertalak yang suaminya memiliki rujuknya maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu beriddah dari suami. Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk, maka tidak ada nafkah baginya, selama iddahnya dari laki-laki kecuali bila ia hamil, maka wajib bagi laki-laki memberikan nafkah kepadanya karena hamil.²¹

E. Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal Mengenai Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba’in

Sehingga dalam masalah fiqh, imam ahmad terkenal dengan menggunakan hadis, terutama dalam masalah munakahat imam ahmad sering menggunakan hadis dalam ijtihadnya, salah satunya ketika membahas hak istri pada masa iddah talak ba’in, imam menggunakan hadis dari Fatimah binti Qais yang berbunyi, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

Abdurahman menceritakan kepada kami, dia berkata : Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah - yakni Ibnu Kuhail – dari asy-Sya’bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang perempuan yang dithalak tiga, “dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. (Musnad Imam Ahmad no: 27200)²²

²⁰ Muhammad bin Idris Asy Safi’I, *al-Umm*, (Darul Hadis, 2008), h 89

²¹ Muhammad bin Idris Asy Safi’I, *al-Umm*, h 89

²² Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, alih bahasa, Ali Murtadho dan Ibnu Arif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)., h 729

Hadis di atas ini yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, bahwa apabila terjadi perpisahan karena talak tiga dan suami tidak bisa merujuk kembali, maka perempuan tersebut tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah dari pihak mantan suaminya. Hal ini berlaku bila perempuan tidak hamil, sedangkan bila dia dalam keadaan hamil maka dia berhak mendapatkan nafkah karena perpisahan disaat sedang hamil.²³ Hal ini tentunya di dasarkan kepada hadis Fatimah binti Qais, dimana Fatimah tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, ketika tertalak ba'in.

F. Hak Istri Pada Masa Iddah Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Menurut Undang-undangan No. 1 Tahun 1974, hak istri pada masa iddah dimasukan kedalam pasal 41, yaitu :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²⁴

Berdasarkan pasal 41 c bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan sedikit saja tentang hak istri pada masa iddah, tanpa menjelaskan apakah istri yang diceraikan itu, tertalak raj'i atau ba'in, padahal apabila dilihat dari hukum Islam dampak talak raj'i dan ba'in memiliki dampak hukum yang berbeda.

Selain itu juga Penjelasan terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974, melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada pasal 24 ayat 2 hanya menjelaskan :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.²⁵

²³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Dar kutub 2011), h 66

²⁴ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung : Citra Umbara, 2012) h 14

1. Hak istri pada masa iddah talak ba'in menurut Kompilasi Hukum Islam

Aturan yang sedikit lebih rinci ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal pemberian hak nafkah kepada istri yang tertalak, dalam ini KHI menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan pasal 149 yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁶

Berdasarkan pasal 149 b dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah talak raj'i, tetapi untuk iddah talak ba'in istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal).

2. Analisis

Apabila dicermati lebih dalam tentang hak nafkah iddah talak ba'in, menurut hukum islam dalam hal ini perspektif para Imam Mazhab yang sebenarnya bersumber pada firman Allah SWT surat at-talak ayat 6 yang berbunyi :

Artinya:

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

²⁵ Undang-undang Pokok Perkawinan h 40

²⁶ Kompilasi Hukum Islam., h 149

nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Sehingga, imam Syafi'i menjelaskan ayat di atas bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya, yang tidak memiliki rujuk, untuk memberikan tempat tinggal secara umum serta tidak berhak atas nafkah. Sedangkan bagi perempuan yang sedang hamil dari mereka adalah bagian yang ditunjuki oleh al-kitab bahwa tidak ada nafkah yang selain wanita hamil.²⁷

Serta dalil yang digunakan para imam mazhab yaitu hadis dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Artinya:

Abdurahman menceritakan kepada kami, dia berkata : Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah - yakni Ibnu Kuhail – dari asy-Sya'bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang perempuan yang ditalak tiga, “dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. (Musnad Imam Ahmad no: 27200).

Berdasarkan hadis di atas menurut Imam Ahmad bahwa seorang perempuan yang ditalak ba'in, oleh suaminya tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan talak tiga memiliki akibat suami tidak bisa merujuk kembali istrinya, oleh sebab itu istri tersebut tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah.

Sebagai tambahan, bahwa sebenarnya Fatimah menjalani masa iddahnya di rumah Ibn Umi Maktum, dan bukan di rumah Abu Amr bin Hafsh yaitu mantan suaminya, hal ini menunjukkan bahwa Fatimah tidak mempunyai hak tempat tinggal, perlu diketahui bahwa Fatimah bin Qais termasuk wanita yang panjang lidahnya terhadap keluarga suaminya. sehingga sahabat-sahabat lain seperti Aisyah, Marwan, Yazid ibn al-Musayyab mengingkari hadis ini, karena bisa jadi dia menyembunyikan

²⁷ Muhammad bin Idris Asy Safi'I, *al-Umm*, (Darul Hadis, 2008), h 89

sebab mengapa Rasulullah memerintahkannya untuk menjalani masa iddah bukan di rumah suaminya.

Walaupun sebenarnya banyak para sahabat yang menolak hadis di atas, tetapi hadis ini ditolak dikarenakan diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, yang terkenal dengan wanita yang panjang lidahnya, bukan karena tingkat kesahihannya, sehingga hadis ini sebenarnya dapat dijadikan hujjah oleh para ulama. Tidak hanya pendapat imam Ahmad, yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak ba'in tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia memiliki kesamaan hukum tentang hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pasal 149 b

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Berdasarkan penjelasan pasal 149 b di atas bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah talak raj'i, tetapi untuk iddah talak ba'in istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal) kecuali istri tersebut dalam keadaan hamil.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, terbuat dari berbagai kitab fiqh yang telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah macam kitab fiqh klasik, al Mughni kitab pokok mazhab hanbali menjadi salah satunya, bilamana melihat sejarah KHi ini sendiri ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh syafi'i saja melainkan mazhab lain juga digunakan. Sehingga sangat wajar apabila suatu pendapat mazhab hanbali memiliki kesamaan dengan salah satu pasal hukum yang ada di Indonesia.

Tetapi tentunya dalam hal ini istri pihak istri akan merasa dirugikan, dikarenakan istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika menjalani masa iddah, sedangkan masa iddah yang sedang dijalani oleh istri tidak lain, dikarenakan akibat dari talak yang dijatuhkan kepadanya. Padahal di dalam al-Qur'an sendiri pihak istri seharusnya berhak atas tempat tinggal, didasarkan pada surat at-Talak ayat 6 yang berbunyi:

Artinya:

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan ayat di atas, imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya, dengan talak ba'in, untuk memberikan tempat tinggal secara umum serta tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali bila dia hamil.

“Dari Malik bahwa ia mendengar Ibn Syihab berkata : wanita yang ditalak tiga tidak boleh keluar dari rumahnya hingga halal (selesai masa iddahnya), namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali bila hamil ia mendapatka nafkah hingga melahirkan”. Malik mengatakan, “demikian pula pendapat kami.”²⁸,

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dari imam-imam yang lain, mengenai hak istri pada masa iddah talak ba'in ini. Dengan alasan bahwa ketika istri menjalani masa iddah, hal ini disebabkan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, ketika istri menempati rumah suaminya akibat talak yang diterimanya, maka sudah barang tentu istri berhak atas nafkah dari suaminya. Mengenai hadis Fatimah binti Qais bahwa tidak mungkin untuk men-*Takhsiss* keumuman surah at-Talak ayat: 6. Oleh karena itu, dalil yang paling kuat mengenai status hak nafkah, bagi perempuan yang ditalak ba'in adalah keumuman surat at-Talak ayat: 6. Dan hal ini yang seharusnya dicontoh oleh perundang-undangan di Indonesia, bahwa istri yang tertalak raj'i atau ba'in, mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, secara umum.

G. Kesimpulan

²⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, h 820

Studi ini telah menunjukkan bahwa hak nafkah perempuan pasca bercerai, sangatlah penting. Hak nafkah talak ba'in, yang diterima oleh mantan istri menurut para imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, memiliki perbedaan dan persamaan di antaranya yaitu :

1. Imam mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hak istri pada masa iddah talak ba'in, yaitu; menurut Imam Abu Hanifah, istri yang ditalak ba'in berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Tidak berhak atas nafkah, tetapi mendapatkan hak tempat tinggal adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat Imam Ahmad.
2. Relevansi pendapat Imam Ahmad dengan perundang-undangan perkawinan di Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 b dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah talak raj'i, tetapi untuk iddah talak ba'in istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal).
3. Implikasi dari pasal 149 b, istri yang ditalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dalam hal ini tentunya pihak istri akan merasa dirugikan, dikarenakan istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika menjalani masa iddah, sedangkan masa iddah yang sedang dijalani oleh mantan istri tidak lain, dikarenakan akibat dari talak yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini tentunya akan merugikan pihak istri yang selama ini hak nafkah dan tempat tinggal selalu dipenuhi oleh suaminya tersebut. Pendapat yang sebaliknya diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa mantan istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal meskipun mantan istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in oleh mantan suaminya. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi mantan istri tersebut, apalagi iddah yang dijalannya untuk kebaikan keduanya (mantan suami dan mantan istri).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, alih bahasa Abdul Majid (Solo: Aqwam, 2012)
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad*, alih bahasa Umar Mujaahid (Solo, Aqwam, 2013)
- Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeb Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta, Amzah, 2009
- Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* alih bahasa Machfuddin Aladip, Semarang, Toha Putra, 1985..
- [http:// www.kompasiana .com/pak cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam](http://www.kompasiana.com/pak-cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam). 8 february 2015
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, alih bahasa Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)

- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, alih bahasa, Ali Murtadho dan Ibnu Arif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Imam Tholkhah dan Ichtijanto, *Perkawinan Perceraian*, (Jakarta: Deprtemen Agama RI 2002).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Prkawinan I*, (Yogyakarta: Akademia, 2005).
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta: Inis Leiden, 2002).
- Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010).
- M.Anshari, *Hukum Perkawinan Di indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)., h 818
- Muhammad ibn Idris asy Syafi'i, *al Umm jilid 6*, (Madinah, Darul Wafai), h.,
- Musdalifah, "Tingkat Perceraian", dalam <http://www.republika.co.id>. 24 januari 2012
- Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro, jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999).
- Syams ad-Din As-Sarakhsi, *al-Mabsut* jilid V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989),
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (bandung : Citra Umbara, 2012)
- Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Riyat: Darul Fikir Ma'asir, 2004),
- Wahyu Setiawan, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta, 2004).